

Analisis Pengaruh Indeks Demokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Mengoptimalkan Fungsi Otonomi dan Desentralisasi Daerah

Dedy Harianto Hutasoit¹ Jelin Rachel Stephoney Saragih² Jesica Septi Leony Simanungkalit³ Ros Juliana Lubis⁴ Putri Kemala Dewi Lubis⁵

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: dedyhutasoit1@gmail.com¹ jelinsaragih16@gmail.com² jesticaseleonsy25@gmail.com³ rosjuliana546@gmail.com⁴ putrikemala@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara, dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi otonomi dan desentralisasi daerah. Data diperoleh dari tahun 2011 hingga 2023, menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IDI memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan IPM tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Tingkat kemandirian keuangan daerah Sumatera Utara tergolong rendah, dengan rata-rata 30,55%, menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian keuangan daerah. Hasil ini diharapkan dapat menjadi acuan pengambilan kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah.

Kata Kunci: Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia, Kemandirian Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, Desentralisasi

Abstract

This research analyzes the influence of the Indonesian Democracy Index (IDI) and Human Development Index (IPM) on the level of regional financial independence in North Sumatra Province, with the aim of optimizing the function of regional autonomy and decentralization. Data was obtained from 2011 to 2023, using quantitative methods and multiple regression analysis. The research results show that IDI has a significant influence on regional financial independence, while IPM does not show a significant relationship. The level of financial independence in the North Sumatra region is relatively low, with an average of 30.55%, indicating high dependence on transfer funds from the central government. This research recommends strengthening community participation, improving the quality of education and health, and optimizing Original Regional Income (PAD) to encourage regional financial independence. It is hoped that these results can become a reference for more strategic and sustainable policy making in supporting regional development.

Keywords: Indonesian Democracy Index, Human Development Index, Regional Financial Independence, Regional Autonomy, Decentralization



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan konsep fundamental dalam tata kelola pemerintahan modern di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Provinsi Sumatera Utara, sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia bagian barat, menjadi fokus penting dalam kajian

implementasi otonomi daerah dan kemandirian keuangan. Dinamika pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari dua indikator kunci: Indeks Demokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kedua indeks ini memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Sumatera Utara menghadapi tantangan kompleks dalam mengoptimalkan kedua indeks tersebut guna meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Utara menunjukkan angka 80,34, yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 79,51. Kondisi ini mengindikasikan provinsi Sumatera Utara memiliki demokrasi yang tinggi namun terlepas dari itu masih terdapatnya ruang perbaikan dalam praktik demokrasi dan partisipasi masyarakat di tingkat daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara pada tahun 2023 tercatat sebesar 73,37, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya namun masih tertinggal dari beberapa provinsi lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah. Rasio kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 mencapai 72,6%, yang masih relatif rendah dibandingkan dengan potensi ekonomi dan sumber daya yang dimiliki. Tantangan kompleks yang dihadapi Sumatera Utara meliputi ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat, keterbatasan kemampuan pajak daerah, serta belum optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal. Hal ini menuntut pendekatan komprehensif dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.



Gambar 1. Grafik Tingkat Persentasi Demokrasi, Pembangunan Manusia dan Kemandirian Keuangan Daerah

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumut diolah (BPS, 2024)

Hubungan antara indeks demokrasi dan pembangunan manusia dengan kemandirian keuangan daerah bersifat multidimensional. Semakin tinggi kualitas demokrasi dan pembangunan sumber daya manusia, diharapkan akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Secara teoritis, demokrasi yang berkualitas akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mendukung transparansi pengelolaan keuangan, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif (Alifia, 2024). Namun, realitas di Sumatera Utara menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara konsep dan implementasi. Indeks Pembangunan Manusia memiliki korelasi erat dengan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah (Simbolon, 2021). Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini berupaya

menganalisis secara mendalam pengaruh kompleks antara indeks demokrasi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi berganda akan digunakan untuk mengukur hubungan kausal antar variabel.

Konteks historis pembangunan Sumatera Utara menunjukkan bahwa sejak era reformasi, provinsi ini telah mengalami transformasi signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Namun, tantangan struktural dalam mencapai kemandirian daerah masih menjadi isu fundamental. Faktor geografis dan demografis Sumatera Utara, dengan keragaman etnis dan potensi sumber daya alamnya, menambah kompleksitas dalam upaya mengoptimalkan fungsi otonomi dan desentralisasi. Setiap kabupaten/kota memiliki karakteristik dan tantangan unik dalam pembangunan daerahnya (Wana & Juniartika, n.d.). Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi pemerintahan daerah diharapkan dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Failany & Fahriani, 2024). Namun, implementasinya masih memerlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Aspek kelembagaan dan tata pemerintahan memainkan peran krusial dalam mendorong kemandirian keuangan daerah. Reformasi birokrasi, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi prasyarat fundamental dalam mencapai otonomi daerah yang sesungguhnya. (Patria, 2024)

Penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis kuantitatif, tetapi juga bermaksud memberikan rekomendasi praktis bagi pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan komprehensif diperlukan untuk mengatasi kompleksitas tantangan pembangunan daerah. Ketimpangan antarwilayah dalam Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu isu kritis yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Wilayah pesisir, dataran tinggi, dan perkotaan memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda, menuntut strategi pembangunan yang disesuaikan. Peran serta masyarakat dan pelaku ekonomi lokal menjadi faktor determinan dalam mendorong kemandirian keuangan daerah. Pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta inovasi daerah perlu mendapatkan perhatian serius. Konteks global dan nasional turut memengaruhi dinamika pembangunan daerah. Tantangan seperti perubahan iklim, pandemi global, dan transformasi ekonomi digital memerlukan respons cepat dan adaptif dari pemerintah daerah (Sahir, 2024) khususnya pemerintahan provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami hubungan kompleks antara indeks demokrasi, indeks pembangunan manusia, dan kemandirian keuangan daerah. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan kebijakan daerah yang lebih berkelanjutan. Signifikansi penelitian terletak pada upaya sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Dengan pendekatan komprehensif, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang tepat dalam mengoptimalkan fungsi otonomi dan desentralisasi daerah.

Kajian Teori

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa

serta pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Suci dan Asmara, 2014). Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007). Kebijakan desentralisasi fiskal tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya UU tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya untuk mewujudkan kemandirian daerah.

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola secara mandiri, kreatif dan inovatif untuk mengatur daerahnya sesuai karakteristik daerah, potensi serta sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal dan kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Khusaini, 2006). Indikator dari keberhasilan otonomi daerah adalah kemampuan mengelola sumberdaya daya ekonominya secara baik, salah satu indikatornya adalah mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah secara maksimal. Kemampuan mengelola Pendapatan Asli Daerah sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah Semakin tinggi PAD yang diperoleh maka semakin tinggi pula dana yang dapat digunakan pemerintah dalam membangun layanan publik bagi masyarakat. Jika layanan publik dapat terpenuhi dengan baik diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat meningkat.

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2004) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai aspirasi, kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi, (Suci dan Asmara, 2014).

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2007). Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pihak ekstern) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Dana Pinjaman (Widodo, 2001). Adapun kemandirian suatu daerah serta pola hubungannya dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25%	Instruktif
Rendah	25 – 50%	Konsultatif
Sedang	50 – 75%	Partisipatif
Tinggi	75 – 100%	Delegatif

Indeks Demokrasi Indonesia

Secara umum, definisi demokrasi yang ideal atau disebut sebagai definisi populistik adalah sebuah sistem pemerintahan "dari, oleh, dan untuk rakyat". Namun, pada tingkat kenyataan, praktik demokrasi sebagaimana dikemukakan di atas, tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat; dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat (Dahl 1971; Coppedge dan Reinicke 1993). IDI adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah, dalam hal ini Indonesia. Indeks ini mengukur berbagai aspek demokrasi, seperti kebebasan sipil, hak politik, dan kinerja lembaga-lembaga negara. Terdapat hubungan yang positif antara IDI dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi nilai IDI suatu daerah, cenderung semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangannya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Amartya Sen memperkenalkan pendekatan kemampuan (Capability Approach) yang menjadi dasar konseptual untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Sen, pembangunan manusia harus dilihat bagai aktivitas memperluas kebebasan nyata yang dinikmati oleh orang-orang. IPM didasarkan pada tiga dimensi utama: kesehatan (sehat dan panjang umur), pendidikan (pengetahuan), dan kelayakan hidup. Pendekatan ini menekankan bahwa pembangunan harus mengarah pada peningkatan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai (Sen, 1999). Secara umum, terdapat hubungan yang positif antara IPM dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi IPM suatu daerah, cenderung semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangannya. Adapun kategori tingkat indeks pembangunan manusia yaitu:

- 0 – 55: Pembangunan manusia rendah.
- 55 – 70: Pembangunan manusia sedang.
- 70 – 80: Pembangunan manusia tinggi.
- 80 – 100: Pembangunan manusia sangat tinggi (Fukuda-Parr & Kumar, 2003).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat induktif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi, di mana proses pengumpulan datanya diperoleh dari kondisi yang alamiah menggunakan teknik triangulasi dan peneliti itu bertindak sebagai instrumen kunci dalam proses penelitian (Sugiono, 2016). Metode ini digunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana pengaruh Indeks Demokrasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan Fungsi Otonomi dan Desentralisasi Daerah. Metode ini dipilih karena tujuan penilitaan adalah untuk menghubungkan sebab akibat antara variabel yang ada dalam seperti Indeks Demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Selain menggunakan metode pendekatan kuantitatif penelitian ini juga menggunakan teori

kajian literatur untuk menguatkan penelitian, untuk mengumpulkan referensi yang relevan yang sesuai dengan topik penelitian ini, seperti Indeks Demokrasi, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan Fungsi Otonomi dan Desentralisasi Daerah. Penelitian kajian literatur adalah suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu (Marzali, 2017). Pengumpulan data kajian literatur dilakukan melalui kajian pustaka dari sumber-sumber rujukan yang relevan dari buku dan jurnal untuk dianalisis dan diklasifikasikan yang dapat membantu pemahaman dan melengkapi pengetahuan mengenai terkait penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data (TPD)

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber resmi, seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia, laporan tahunan pemerintah daerah, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen-dokumen lain yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan data dari Tahun 2011-2023. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan Eviews, di mana peneliti akan menerapkan model analisis Regresi linier berganda, untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel terhadap kemandirian keuangan daerah. Analisis regresi linier berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas, dengan tujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan nilai-nilai variabel bebas tersebut serta untuk memahami pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian Hipotesis dalam olah data ini melakukan uji simultan (uji F) dan uji signifikansi (uji T). Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan uji T dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Sulistiyono & Sulistiyowati, 2017)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah Sumatera Utara

Tahun	PAD	Dana Perimbangan	Kemampuan Keuangan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
2011	5.511,85	16.739,77	Rendah	32,93%	Konsultatif
2012	6.436,85	19.816,21	Rendah	32,48%	Konsultatif
2013	6.753,06	22.275,68	Rendah	30,32%	Konsultatif
2014	7.890,52	23.955,28	Rendah	32,94%	Konsultatif
2015	8.749,67	24.941,65	Rendah	35,08%	Konsultatif
2016	9.136,81	36.974,24	Rendah Sekali	24,71%	Instruktif
2017	10.732,00	37.096,29	Rendah	28,93%	Konsultatif
2018	10.800,05	38.490,34	Rendah	28,06%	Konsultatif
2019	11.312,41	40.481,40	Rendah	27,94%	Konsultatif
2020	10.608,31	37.724,12	Rendah	28,12%	Konsultatif
2021	12.061,87	40.812,52	Rendah	29,55%	Konsultatif
2022	13.164,25	39.252,21	Rendah	33,54%	Konsultatif
2023	13.657,11	41.963,78	Rendah	32,54%	Konsultatif
Rata-Rata			Rendah	30,55%	Konsultatif

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian rata-rata dari tahun 2011-2023 di Sumatera Utara mencapai 30,55% sehingga kemandirian di provinsi ini tergolong rendah artinya provinsi ini masih sangat bergantung dari transfer pemerintah pusat.

Uji T

Menurut Sahir (2021) uji T adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial untuk mengetahui signifikansi secara parsial terhadap variabel terikat.

1. Hipotesis diterima jika t signifikan $< 0,05$
2. Hipotesis ditolak jika t signifikan $> 0,05$

Tabel 3. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5792.215	109.2252	53.03004	0.0000
IDI	-41.31156	1.482421	-27.86762	0.0000
IPM	0.001469	0.003919	0.374921	0.7155

Variabel IDI memiliki nilai t statistic sebesar -27.867 dengan nilai probability sebesar 0,0000 ($< 0,05$). Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel IDI berpengaruh signifikan terhadap Variabel Kemandirian. Variabel IPM memiliki nilai t statistic sebesar 0,374 dengan nilai probability sebesar 0,7155 ($> 0,05$). Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Variabel Kemandirian.

Uji signifikan Simultan (Uji F Statistik)

Tabel 4. Uji F

Model	F	Sig.	Kesimpulan
Regression	407.9307	0,0000	Signifikan

Diketahui nilai F-Statistic sebesar 407.9307 dengan nilai Prob (F-Statistic) sebesar 0,0000 $< 0,05$. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap variabel KEMANDIRIAN.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0.985470, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 98,54%. Sedangkan sisanya 1,46% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil Pengujian hipotesis pertama pada penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi berpengaruh terhadap tingkat kemandirian di Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara Indeks Demokrasi Indonesia dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat demokrasi suatu daerah, semakin besar pula kemampuan daerah tersebut dalam mengelola keuangan secara mandiri. Demokrasi yang kuat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan partisipasi masyarakat, sehingga mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah dan pada akhirnya meningkatkan kemandirian daerah.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Hasil Pengujian hipotesis kedua pada penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara IPM dan tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain, seperti kebijakan fiskal daerah dan potensi sumber daya alam, memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan tingkat kemandirian suatu daerah. Meskipun IPM merupakan indikator penting untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, namun IPM tidak dapat dijadikan satu-satunya variabel yang menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai pengaruh indeks demokrasi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara, dapat disimpulkan bahwa peningkatan indeks demokrasi memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat lebih terlibat, pemerintah daerah cenderung menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga, yang pada gilirannya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini berkontribusi secara signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, indeks pembangunan manusia yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan juga berpengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas hidup, masyarakat memiliki potensi yang lebih besar untuk berkontribusi pada perekonomian daerah. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan ekonomi lokal, yang berdampak positif pada kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsi otonomi dan desentralisasi. Dengan sumber daya keuangan yang memadai, pemerintah daerah dapat merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa bergantung secara berlebihan pada bantuan dari pemerintah pusat. Ini menciptakan desentralisasi yang lebih efektif, di mana kebijakan dapat disesuaikan dengan konteks lokal. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara, perlu ada perhatian khusus terhadap peningkatan indeks demokrasi dan pembangunan manusia. Kebijakan yang mendukung partisipasi publik, pendidikan, dan kesehatan harus menjadi prioritas agar kemandirian finansial dapat tercapai secara berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan aspek demokrasi dan pembangunan manusia tidak hanya penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah, tetapi juga untuk memperkuat otonomi dan desentralisasi, sehingga menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Saran

Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan:

1. Pemerintah daerah disarankan untuk lebih aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui program-program seperti forum diskusi dan konsultasi publik yang mendorong keterlibatan warga.
2. Penting bagi pemerintah untuk memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Investasi dalam sektor-sektor ini akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan sumber daya manusia yang lebih produktif dan berdaya saing.

3. Pemerintah daerah sebaiknya mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan baru, seperti pajak daerah dan retribusi. Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pajak dan retribusi sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.
4. Pelatihan bagi pegawai pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan perlu ditingkatkan agar mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola sumber daya keuangan daerah secara efektif.
5. Kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga harus diperkuat untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal. Dengan membangun kemitraan yang saling menguntungkan, Provinsi Sumatera Utara dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Achmad Endah Siswati Agus Wahyudi Achmad, Z., Abidin Siswati, Z., & Wahyudi, E. (2020). Agus Wahyudi Edisi Pertama-Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2020 Anggota IKAPI No. 195/JTI/2018 1 jil., 17 × 24 cm (Vol. 82). www.indomediapustaka.com
- Alifia, V. A. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pariwisata Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah. *UNES Law Review*
- Amtai Alasan, S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: Rajawali Pers.
- BPS, S. U. (2024). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Sumatera Utara*.
- Ekonomi, J., dan Manajemen Multiparadigma Volume, A., & Bailusy, M. N. (2019). Kinerja Keuangan Daerah Dan Indeks Pembangunan Manusia: Mediasi Pertumbuhan Ekonomi. 244 *JEAMM*, 1(1).
- Failany, M. A., & Fahriani, D. (2024). Penerapan Teknologi Digital dalam Mendukung Transparansi Keuangan Pemerintah
- Giri, M., Yaqien, A., Sutjipto, H., Desmawan, D., & Harahap, M. N. (n.d.). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2016-2023. Jalan Raya Palka No.Km, 3.
- Patria, N. (2024). *Satu Dekade Pembangunan Digital Indonesia 2014 – 2024*. PT Sarana Ecommerce Nusantara.
- Putra Prasetya, B. (2024). Pengaruh IPM dan Kemandirian Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pemerintah Kota Yogyakarta (Vol. 7, Issue 1).
- Sahir, H. S. (2024). *Ekonomi Global: Tantangan dan Peluang di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis.
- Simbolon, T. R. (2021). Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Per Kapita Dan Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. Universitas Negeri Medan.
- Tesa Nur Padilah, R. I. (2019). Analisis Regresi Linier Berganda Dalam Estimasi Produktivitas Tanaman Padi Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pendidikan Matematika dan Matematika*, 117-128.
- wana, D., & Juniartika, S. (n.d.). *Determinan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia*. 2021.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 2896-2910.